



Politik Islam dan Demokrasi Kontemporer dalam Konteks Negara Bangsa Indonesia yang Plural Demokratis Modern Berkelanjutan

Mardian Idris Harahap^{1*}, Alwi Murad Sofi Hasibuan², Febriani br Ginting³, Alya Qais Tsabitah⁴, Mora Nanda Tambak⁵, Reh Ngenana⁶, Dhea Amelia Nanda Lubis⁷, Mara Halim⁸, Ryanda Iqbal Pradipta Widadi⁹, Muhammad Jasir Siregar¹⁰

¹⁻¹⁰Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email : mardianidris@uinsu.ac.id^{1*}, abwi0404221014@uinsu.ac.id², febriani0404221016@uinsu.ac.id³, alya0404221019@uinsu.ac.id⁴, mora0404221025@uinsu.ac.id⁵, ngenana0404222021@uinsu.ac.id⁶, dhea0404222024@uinsu.ac.id⁷, mara0404222026@uinsu.ac.id⁸, ryanda0404222028@uinsu.ac.id⁹, muhhammad0404222030@uinsu.ac.id¹⁰

*Penulis Korespondensi: mardianidris@uinsu.ac.id

Abstract. *This article examines the relationship between Islamic politics and democracy in contemporary Indonesia. As the country with the largest Muslim population in the world, Indonesia presents a distinctive dynamic in the interaction between Islamic values and modern democratic systems. This study aims to analyze how Islamic political actors, including political parties and religious organizations, interact with and adapt to democratic practices in the post-Reform era. The research employs a qualitative method through a literature review of Indonesian academic journals published within the last five years. The findings indicate that Islamic politics in Indonesia is plural and dynamic, showing an adaptive tendency toward democratic principles. Islamic values such as deliberation (shura), justice, and equality are considered compatible with democratic ideals. However, Islamic politics also faces contemporary challenges, including the politicization of religion, identity politics, and social polarization. The article concludes that the relationship between Islamic politics and democracy in Indonesia is dynamic and largely adaptive within the framework of the Pancasila state.*

Keywords: *Contemporary Democracy; Identity Politics; Indonesia; Islamic Politics; Pancasila State.*

Abstak. Artikel ini membahas relasi antara politik Islam dan demokrasi dalam konteks kontemporer di Indonesia. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia menghadirkan dinamika tersendiri dalam pertemuan nilai-nilai Islam dan sistem demokrasi modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana aktor-aktor politik Islam, baik partai politik maupun organisasi keagamaan, berinteraksi dan beradaptasi dengan praktik demokrasi pasca-Reformasi. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif melalui studi pustaka terhadap jurnal-jurnal ilmiah Indonesia yang terbit dalam lima tahun terakhir. Hasil kajian menunjukkan bahwa politik Islam di Indonesia bersifat plural dan dinamis, dengan kecenderungan adaptif terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Nilai-nilai Islam seperti musyawarah, keadilan, dan kesetaraan dinilai memiliki relevansi dengan demokrasi. Namun demikian, politik Islam juga menghadapi tantangan berupa politisasi agama, politik identitas, dan polarisasi sosial. Artikel ini menyimpulkan bahwa hubungan antara politik Islam dan demokrasi di Indonesia bersifat dinamis dalam kerangka negara Pancasila.

Kata kunci: Demokrasi Kontemporer; Indonesia; Negara Pancasila; Politik Identitas; Politik Islam.

1. PENDAHULUAN

Demokrasi telah menjadi sistem politik yang dominan di Indonesia sejak era Reformasi 1998. Perubahan politik tersebut membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat sipil, termasuk kelompok-kelompok keagamaan, khususnya Islam sebagai agama mayoritas. Kehadiran Islam dalam ranah politik tidak hanya diwujudkan melalui partai politik berbasis Islam, tetapi juga melalui peran organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, dan gerakan sosial yang memiliki pengaruh signifikan terhadap dinamika politik nasional.

Hubungan antara politik Islam dan demokrasi sering kali menjadi perdebatan akademik. Sebagian pandangan menilai bahwa Islam dan demokrasi memiliki ketegangan

konseptual, terutama terkait isu kedaulatan, hukum, dan otoritas politik. Namun, pandangan lain melihat adanya titik temu antara nilai-nilai Islam dan prinsip demokrasi, seperti musyawarah (*shura*), keadilan, kesetaraan, dan partisipasi publik. Dalam konteks Indonesia, perdebatan tersebut tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga tercermin dalam praktik politik sehari-hari.

Dalam perkembangan kontemporer, politik Islam di Indonesia menunjukkan karakter yang beragam (Hefner, 2011). Di satu sisi, terdapat kelompok Islam yang mengadopsi pendekatan moderat dan inklusif terhadap demokrasi (Mietzner, 2020). Di sisi lain, muncul pula fenomena politisasi agama dan politik identitas yang berpotensi menimbulkan polarisasi sosial (Hadiz, 2018). Kondisi ini menjadi tantangan bagi konsolidasi demokrasi serta penguatan prinsip kebhinekaan dalam negara Pancasila (Menchik, 2016).

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis relasi antara politik Islam dan demokrasi kontemporer di Indonesia (Bush, 2009). Fokus kajian diarahkan pada bentuk adaptasi aktor-aktor politik Islam terhadap sistem demokrasi serta tantangan yang dihadapi dalam praktik politik modern (Pepinsky, Liddle, & Mujani, 2018). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memahami dinamika politik Islam di Indonesia serta memperkaya diskursus tentang hubungan agama dan demokrasi di masyarakat majemuk (Aspinall & Mietzner, 2019).

Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan media sosial turut memengaruhi wajah politik Islam dan demokrasi kontemporer. Ruang digital menjadi arena baru bagi penyebaran gagasan keislaman sekaligus mobilisasi politik, yang dalam beberapa kasus memperkuat partisipasi politik masyarakat. Namun, pada saat yang sama, media digital juga berpotensi mempercepat penyebaran narasi eksklusif, disinformasi, dan ujaran kebencian berbasis agama. Kondisi ini menuntut aktor politik Islam untuk tidak hanya mampu beradaptasi dengan sistem demokrasi formal, tetapi juga memiliki komitmen terhadap etika politik, toleransi, dan penguatan demokrasi substantif. Oleh karena itu, kajian mengenai politik Islam dan demokrasi kontemporer menjadi semakin relevan dalam membaca arah perkembangan demokrasi Indonesia ke depan.

2. TINJAUAN TEORITIS

Teori Politik Islam dan Demokrasi dalam Perspektif Normatif-Konstitusional

Teori politik Islam dalam perspektif normatif-konstitusional memandang bahwa nilai-nilai Islam dapat diintegrasikan ke dalam sistem demokrasi melalui kerangka hukum dan konstitusi negara. Demokrasi tidak dipahami sebagai sistem yang bertentangan dengan Islam,

melainkan sebagai ruang implementasi prinsip-prinsip syura, keadilan, dan kemaslahatan publik. Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini menempatkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai titik temu antara ajaran Islam dan sistem demokrasi modern. Politik Islam berperan sebagai kekuatan moral yang memberi arah etis bagi kebijakan publik tanpa harus menuntut formalisasi agama dalam negara. Teori ini menekankan pentingnya supremasi hukum, mekanisme representasi rakyat, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai bagian dari tujuan syariat. Dengan demikian, politik Islam dapat beroperasi secara konstitusional dan demokratis dalam negara bangsa yang plural. (Ahmad Burhan Hakim & Sejati, 2024)

Teori Fikih Siyasah dalam Praktik Demokrasi Elektoral

Teori fikih siyasah memberikan landasan teologis bagi keterlibatan umat Islam dalam proses demokrasi elektoral seperti pemilu. Demokrasi dipahami sebagai sarana untuk memilih pemimpin yang adil dan amanah, sejalan dengan prinsip Islam tentang kepemimpinan. Pemilu dianggap sebagai bentuk modern dari musyawarah yang memungkinkan partisipasi masyarakat secara luas. Dalam konteks Indonesia, fikih siyasah berfungsi sebagai jembatan konseptual antara nilai-nilai Islam dan praktik demokrasi kontemporer. Teori ini menolak pandangan yang mengharamkan demokrasi secara mutlak, selama sistem tersebut digunakan untuk mencapai tujuan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, keterlibatan partai politik Islam dan tokoh Muslim dalam pemilu dipandang sah secara syar'i dan konstitusional. (Yamani, 2023)

Teori Pluralisme Politik Islam dalam Negara Bangsa

Teori pluralisme politik Islam menekankan bahwa politik Islam di Indonesia tidak bersifat tunggal, melainkan terdiri dari berbagai corak pemikiran dan strategi politik. Keberagaman ini mencerminkan kemampuan Islam untuk beradaptasi dengan konteks sosial, budaya, dan politik yang berbeda. Dalam negara bangsa Indonesia yang majemuk, politik Islam berkembang dalam bentuk partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan gerakan sipil yang memiliki orientasi demokratis. Teori ini melihat pluralisme sebagai kekuatan, bukan ancaman, karena membuka ruang dialog dan kompromi antar kelompok. Politik Islam tidak hanya berorientasi pada kekuasaan, tetapi juga pada penguatan demokrasi, toleransi, dan persatuan nasional. Dengan pendekatan ini, Islam berkontribusi pada stabilitas politik dan keberlanjutan demokrasi dalam kerangka Pancasila. (Auliasari & Achmad, 2025)

Teori Tantangan Kontemporer Politik Islam dalam Demokrasi

Teori ini menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi politik Islam dalam praktik demokrasi kontemporer, khususnya di Indonesia. Tantangan tersebut meliputi politisasi agama, menguatnya politik identitas, serta polarisasi sosial yang dapat mengancam kohesi nasional. Dalam konteks pemilu, simbol dan isu keagamaan sering digunakan untuk mobilisasi politik,

yang berpotensi menggeser substansi demokrasi. Teori ini menegaskan bahwa politik Islam harus mampu mengelola identitas keagamaan secara etis dan bertanggung jawab agar tidak merusak prinsip demokrasi. Diperlukan kedewasaan politik dan komitmen terhadap nilai kebangsaan agar Islam tetap menjadi kekuatan pemersatu. Dengan demikian, masa depan politik Islam sangat ditentukan oleh kemampuannya beradaptasi dengan tantangan demokrasi modern dan era digital. (Hidayat & Hidayah, 2024)

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam relasi antara politik Islam dan demokrasi kontemporer dalam konteks negara bangsa Indonesia yang plural. Data penelitian diperoleh dari sumber sekunder berupa artikel jurnal ilmiah Indonesia yang terbit sejak tahun 2020 ke atas, buku akademik, serta dokumen pendukung yang relevan dengan tema politik Islam, demokrasi, dan negara Pancasila. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menyeleksi literatur yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dan interpretatif, yakni dengan menguraikan konsep, pandangan, serta temuan para ahli kemudian mensintesiskannya dalam kerangka teoritis yang sistematis. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika, tantangan, dan kecenderungan adaptasi politik Islam terhadap praktik demokrasi modern di Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam relasi antara politik Islam dan demokrasi kontemporer dalam konteks negara bangsa Indonesia yang plural. Data penelitian diperoleh dari sumber sekunder berupa artikel jurnal ilmiah Indonesia yang terbit sejak tahun 2020 ke atas, buku akademik, serta dokumen pendukung yang relevan dengan tema politik Islam, demokrasi, dan negara Pancasila. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menyeleksi literatur yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dan interpretatif, yakni dengan menguraikan konsep, pandangan, serta temuan para ahli kemudian mensintesiskannya dalam kerangka teoritis yang sistematis. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika, tantangan, dan kecenderungan adaptasi politik Islam terhadap praktik demokrasi modern di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Islam dalam Konteks Demokrasi Indonesia Pasca-Reformasi

Politik Islam di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perubahan besar dalam sistem politik nasional pasca-Reformasi 1998. Reformasi menandai berakhirnya rezim otoritarian Orde Baru dan membuka ruang demokrasi yang luas bagi masyarakat sipil, termasuk kelompok-kelompok Islam. Dalam sistem politik yang lebih terbuka, Islam tidak lagi dibatasi dalam ruang privat atau sosial-keagamaan, tetapi turut hadir secara aktif dalam arena politik formal dan informal.

Demokrasi memberikan kesempatan bagi umat Islam untuk menyalurkan aspirasi politiknya melalui mekanisme konstitusional, seperti pemilihan umum, pembentukan partai politik, serta keterlibatan dalam lembaga perwakilan rakyat. Dalam konteks ini, politik Islam di Indonesia berkembang dalam kerangka demokrasi prosedural yang mengakui prinsip kedaulatan rakyat, kompetisi politik, serta pergantian kekuasaan secara damai. Kehadiran partai-partai politik berbasis Islam menunjukkan bahwa Islam dapat berfungsi sebagai identitas dan sumber nilai politik tanpa harus menolak sistem demokrasi.

Namun, politik Islam di Indonesia tidak bersifat homogen. Terdapat spektrum pemikiran dan praktik politik Islam yang sangat beragam, mulai dari kelompok yang mengusung Islam sebagai sumber nilai etika politik hingga kelompok yang menekankan penerapan simbol-simbol keagamaan dalam ruang publik. Keragaman ini mencerminkan dinamika internal umat Islam Indonesia yang dipengaruhi oleh faktor sejarah, sosial, budaya, dan politik.

Dalam praktik demokrasi, sebagian aktor politik Islam mengadopsi pendekatan pragmatis dengan menyesuaikan agenda politiknya terhadap realitas elektoral dan tuntutan pluralisme masyarakat. Pendekatan ini terlihat dari sikap partai-partai Islam yang tidak lagi menjadikan penerapan syariat Islam secara formal sebagai agenda utama, melainkan lebih menekankan isu-isu universal seperti keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, dan tata kelola pemerintahan yang bersih. Hal ini menunjukkan adanya proses moderasi politik Islam dalam konteks demokrasi Indonesia.

Islam dan Demokrasi: Perdebatan Teoretis dan Praktik Empiris

Hubungan antara Islam dan demokrasi merupakan salah satu tema penting dalam kajian politik Islam kontemporer. Secara teoretis, perdebatan sering kali berpusat pada pertanyaan apakah Islam kompatibel dengan demokrasi. Sebagian pandangan menilai bahwa konsep kedaulatan Tuhan dalam Islam bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dalam

demokrasi. Pandangan ini umumnya muncul dari interpretasi tekstual yang rigid terhadap ajaran Islam.

Namun, pandangan lain menekankan bahwa Islam tidak memiliki sistem politik yang baku dan tertutup. Islam lebih menawarkan prinsip-prinsip normatif yang dapat diadaptasi sesuai dengan konteks sosial dan politik. Konsep *shura* atau musyawarah, misalnya, menunjukkan adanya tradisi partisipasi dan konsultasi dalam pengambilan keputusan politik. Prinsip ini memiliki kemiripan dengan demokrasi deliberatif yang menekankan dialog dan partisipasi publik.

Selain *shura*, nilai keadilan (*'adl*) dan kesetaraan (*musawah*) juga menjadi prinsip utama dalam ajaran Islam yang sejalan dengan demokrasi. Demokrasi modern menempatkan keadilan dan kesetaraan sebagai tujuan utama dalam penyelenggaraan negara, terutama dalam perlindungan hak-hak warga negara. Dengan demikian, Islam dan demokrasi dapat dipandang sebagai dua sistem nilai yang memiliki titik temu, terutama dalam aspek etika politik.

Dalam praktik empiris di Indonesia, hubungan antara Islam dan demokrasi cenderung bersifat adaptif. Mayoritas umat Islam menerima demokrasi sebagai sistem politik yang sah dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal ini tercermin dari tingginya partisipasi politik umat Islam dalam pemilu serta dukungan organisasi Islam besar terhadap demokrasi dan negara Pancasila. Dengan demikian, pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa Islam dan demokrasi tidak harus berada dalam hubungan yang antagonistik.

Peran Partai Politik Islam dalam Demokrasi Kontemporer

Partai politik Islam merupakan aktor penting dalam dinamika politik Islam dan demokrasi di Indonesia. Sejak era Reformasi, partai-partai Islam kembali mendapatkan ruang untuk berkompetisi secara bebas dalam sistem multipartai. Kehadiran mereka memperkaya spektrum politik nasional dan menjadi saluran artikulasi kepentingan umat Islam dalam proses politik formal.

Dalam perkembangannya, partai politik Islam di Indonesia mengalami transformasi orientasi politik. Jika pada masa awal Reformasi sebagian partai Islam masih mengungus agenda ideologis yang kuat, dalam perkembangannya mereka cenderung mengadopsi pendekatan yang lebih moderat dan pragmatis. Hal ini terlihat dari platform politik yang lebih menekankan isu-isu sosial-ekonomi dan tata kelola pemerintahan dibandingkan isu formalisasi syariat Islam.

Transformasi ini menunjukkan bahwa partai politik Islam berusaha menyesuaikan diri dengan tuntutan demokrasi elektoral dan realitas masyarakat yang plural. Dalam sistem demokrasi, keberhasilan politik sangat ditentukan oleh kemampuan menarik dukungan luas

dari pemilih lintas identitas. Oleh karena itu, partai Islam dituntut untuk mengembangkan agenda politik yang inklusif dan relevan bagi seluruh warga negara, bukan hanya umat Islam.

Namun, tantangan tetap dihadapi oleh partai politik Islam, terutama dalam menjaga konsistensi antara identitas keislaman dan praktik politik yang demokratis. Tekanan politik elektoral sering kali mendorong pragmatisme yang berlebihan, sehingga berpotensi mengaburkan nilai-nilai moral yang seharusnya menjadi landasan politik Islam. Tantangan ini menuntut partai politik Islam untuk terus melakukan refleksi dan pembaruan dalam menjalankan perannya dalam demokrasi.

Organisasi Islam dan Penguatan Demokrasi Substantif

Selain partai politik, organisasi Islam memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk hubungan antara Islam dan demokrasi di Indonesia. Organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tidak hanya berperan dalam bidang keagamaan, tetapi juga dalam penguatan demokrasi dan masyarakat sipil. Melalui jaringan pendidikan, sosial, dan dakwah, organisasi-organisasi ini berkontribusi dalam membangun budaya politik yang demokratis.

Peran organisasi Islam dalam demokrasi bersifat substantif, tidak terbatas pada kontestasi politik elektoral. Mereka berperan dalam mengawasi jalannya pemerintahan, menyuarakan kepentingan masyarakat, serta mempromosikan nilai-nilai keadilan, toleransi, dan kebhinekaan. Dalam konteks ini, organisasi Islam berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang yang penting dalam sistem demokrasi.

Komitmen organisasi Islam terhadap demokrasi juga tercermin dalam penerimaan mereka terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Penerimaan ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa demokrasi Indonesia hanya dapat berjalan secara stabil dalam kerangka kebangsaan yang inklusif. Dengan mengedepankan Islam moderat, organisasi-organisasi ini berperan dalam meredam potensi konflik berbasis agama dan memperkuat persatuan nasional.

Politik Identitas dan Tantangan Demokrasi Kontemporer

Salah satu tantangan terbesar dalam hubungan antara politik Islam dan demokrasi kontemporer adalah menguatnya politik identitas berbasis agama. Dalam beberapa tahun terakhir, agama sering kali digunakan sebagai alat mobilisasi politik untuk meraih dukungan elektoral. Praktik ini berpotensi mereduksi agama menjadi instrumen politik yang bersifat pragmatis dan jangka pendek.

Politisasi agama dapat menimbulkan dampak negatif bagi demokrasi, seperti meningkatnya polarisasi sosial dan melemahnya kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi. Ketika identitas agama digunakan secara eksklusif, ruang dialog dan kompromi

yang menjadi ciri demokrasi dapat menyempit. Hal ini berpotensi mengancam kohesi sosial dan stabilitas politik nasional.

Dalam konteks ini, aktor politik Islam dituntut untuk mengedepankan etika politik yang berlandaskan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil ‘alamin. Politik Islam seharusnya berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan bersama, bukan sebagai alat untuk memecah belah masyarakat. Oleh karena itu, penguatan pendidikan politik dan literasi demokrasi menjadi sangat penting dalam menghadapi tantangan politik identitas.

Media Sosial, Islam, dan Demokrasi Digital

Perkembangan teknologi digital dan media sosial membawa dampak signifikan terhadap dinamika politik Islam dan demokrasi kontemporer. Media sosial membuka ruang baru bagi partisipasi politik dan penyebaran gagasan keislaman. Aktor-aktor Islam dapat memanfaatkan platform digital untuk menyampaikan pesan dakwah, pendidikan politik, dan advokasi kebijakan publik.

Namun, media sosial juga menghadirkan tantangan serius, terutama dalam bentuk penyebaran disinformasi, ujaran kebencian, dan narasi keagamaan yang ekstrem. Algoritma media sosial yang cenderung memperkuat polarisasi dapat memperburuk konflik berbasis identitas. Dalam konteks ini, demokrasi digital menghadapi risiko degradasi kualitas diskursus publik.

Aktor politik Islam memiliki tanggung jawab moral untuk menggunakan media digital secara etis dan konstruktif. Pemanfaatan media sosial seharusnya diarahkan untuk memperkuat demokrasi, memperluas dialog antar kelompok, dan mempromosikan nilai-nilai Islam yang moderat dan inklusif.

Politik Islam, Pancasila, dan Masa Depan Demokrasi Indonesia

Dalam konteks negara Pancasila, politik Islam dihadapkan pada tantangan untuk terus menegaskan komitmennya terhadap pluralisme dan kebhinekaan. Pancasila berfungsi sebagai titik temu yang memungkinkan berbagai identitas agama hidup berdampingan secara damai dalam kerangka demokrasi. Oleh karena itu, politik Islam yang berorientasi pada nilai-nilai kebangsaan memiliki potensi besar untuk memperkuat demokrasi Indonesia.

Ke depan, masa depan demokrasi Indonesia sangat bergantung pada kemampuan aktor-aktor politik Islam dalam mengembangkan pendekatan substantif yang berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Politik Islam yang inklusif, moderat, dan berkeadaban dapat menjadi kekuatan moral dalam menjaga kualitas demokrasi di tengah tantangan global dan domestik.

5. KESIMPULAN

Hubungan antara politik Islam dan demokrasi kontemporer di Indonesia menunjukkan dinamika yang kompleks, namun cenderung bersifat adaptif dan kontekstual. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim dan sistem demokrasi yang terus berkembang pasca-Reformasi 1998, Indonesia menghadirkan pengalaman unik dalam mempertemukan nilai-nilai Islam dengan prinsip-prinsip demokrasi modern. Pengalaman ini membuktikan bahwa Islam dan demokrasi tidak harus berada dalam posisi yang saling bertentangan, melainkan dapat saling berinteraksi dan bernegosiasi dalam kerangka sosial-politik yang plural.

Politik Islam di Indonesia berkembang dalam spektrum yang luas, mulai dari pendekatan substantif yang menekankan nilai-nilai etika dan keadilan sosial hingga pendekatan simbolik yang lebih menonjolkan identitas keagamaan. Keragaman ini mencerminkan realitas umat Islam Indonesia yang tidak homogen, baik dari segi pemikiran keagamaan maupun orientasi politik. Dalam konteks demokrasi, keragaman tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang. Di satu sisi, perbedaan orientasi dapat memicu fragmentasi dan konflik politik, namun di sisi lain, hal ini menunjukkan kedewasaan politik Islam dalam merespons dinamika demokrasi yang terbuka.

Temuan utama dalam kajian ini menunjukkan bahwa sebagian besar aktor politik Islam di Indonesia telah menerima demokrasi sebagai sistem politik yang sah dan konstitusional. Penerimaan ini tercermin dalam keterlibatan aktif partai politik Islam dalam pemilu, dukungan organisasi Islam besar terhadap negara Pancasila, serta partisipasi umat Islam dalam berbagai mekanisme demokrasi. Demokrasi dipandang bukan sebagai ancaman terhadap identitas Islam, melainkan sebagai sarana untuk memperjuangkan nilai-nilai keislaman secara damai dan legal, terutama dalam konteks keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan pemerintahan yang bersih.

Nilai-nilai Islam seperti musyawarah (*shura*), keadilan (*'adl*), dan kesetaraan (*musawah*) memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip-prinsip demokrasi modern. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan normatif bagi pengembangan praktik demokrasi yang beretika dan berkeadaban. Dalam konteks Indonesia, organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah memainkan peran strategis dalam mengartikulasikan nilai-nilai Islam yang moderat dan inklusif, sekaligus memperkuat demokrasi substantif. Peran organisasi Islam ini menunjukkan bahwa kontribusi politik Islam terhadap demokrasi tidak selalu harus melalui jalur kekuasaan formal, tetapi juga melalui penguatan masyarakat sipil dan budaya politik demokratis.

Namun demikian, kajian ini juga menegaskan bahwa politik Islam di Indonesia menghadapi berbagai tantangan serius dalam konteks demokrasi kontemporer. Salah satu tantangan utama adalah menguatnya politik identitas berbasis agama yang sering dimanfaatkan dalam kontestasi elektoral. Politisasi agama berpotensi mereduksi nilai-nilai luhur Islam menjadi alat mobilisasi politik jangka pendek, sekaligus memperdalam polarisasi sosial di tengah masyarakat yang plural. Jika tidak dikelola dengan bijak, praktik politik identitas dapat melemahkan kualitas demokrasi dan mengancam persatuan nasional.

Selain itu, perkembangan media sosial dan ruang digital turut memengaruhi wajah politik Islam dan demokrasi. Di satu sisi, media digital membuka peluang besar bagi partisipasi politik dan penyebaran gagasan Islam yang demokratis. Namun di sisi lain, media sosial juga menjadi medium subur bagi penyebaran disinformasi, ujaran kebencian, dan narasi keagamaan yang ekstrem. Kondisi ini menuntut tanggung jawab moral yang lebih besar dari aktor-aktor politik Islam untuk mengedepankan etika komunikasi politik dan literasi digital demi menjaga kualitas demokrasi.

Dalam kerangka negara Pancasila, politik Islam dihadapkan pada tuntutan untuk terus menegaskan komitmennya terhadap pluralisme dan kebhinekaan. Pancasila menjadi fondasi penting yang memungkinkan berbagai identitas agama, termasuk Islam, hidup berdampingan secara damai dalam sistem demokrasi. Oleh karena itu, politik Islam yang inklusif, moderat, dan berorientasi pada kepentingan kebangsaan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas politik dan keberlanjutan demokrasi Indonesia.

Secara keseluruhan, kajian ini menyimpulkan bahwa masa depan hubungan antara politik Islam dan demokrasi di Indonesia sangat bergantung pada orientasi nilai dan praktik politik yang dikembangkan oleh aktor-aktor Islam. Politik Islam yang menekankan substansi nilai, etika publik, dan kemaslahatan bersama berpotensi menjadi kekuatan moral dalam memperkuat demokrasi. Sebaliknya, politik Islam yang eksklusif dan konfrontatif berisiko menjadi sumber konflik dan pelemahan demokrasi. Dengan demikian, sinergi antara nilai-nilai Islam, prinsip demokrasi, dan komitmen kebangsaan merupakan kunci utama dalam membangun demokrasi Indonesia yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Burhan Hakim, & Sejati, P. S. (2024). Demokrasi dan politik Islam dalam perspektif *siyāsah dustūriyyah*. *HOKI: Journal of Islamic Family Law*, 2(1). <https://doi.org/10.55352/hki.v2i1.852>
- Akhmad Z. Yamani. (2023). Pemilu di Indonesia dalam perspektif fikih siyasah: Menjembatani nilai-nilai Islam dan sistem demokrasi. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*. <https://doi.org/10.9963/js5c2g73>
- Aspinall, E., & Mietzner, M. (2019). *Southeast Asia's troubled democracies: Indonesia, Malaysia, and Thailand*. Cambridge University Press.
- Auliasari, V. R., & Achmad, M. (2025). Islam dan demokrasi: Kajian pemikiran teologis dan praktik politik di Indonesia. *IHSANIKA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.59841/ihsanika.v3i1.2350>
- Bush, R. (2009). *Nahdlatul Ulama and the struggle for power within Islam and politics in Indonesia*. Institute of Southeast Asian Studies. <https://doi.org/10.1355/9789812308795>
- Hadiz, V. R. (2018). Imagine all the people? Mobilising Islamic populism for right-wing politics in Indonesia. *Journal of Contemporary Asia*, 48(4), 566–583. <https://doi.org/10.1080/00472336.2018.1433225>
- Hefner, R. W. (2011). *Civil Islam: Muslims and democratization in Indonesia*. Princeton University Press. <https://doi.org/10.1515/9781400823871>
- Hidayat, T., & Hidayah, M. (2024). Islam dan politik identitas menjelang Pemilu 2024. *Asketik: Jurnal Agama dan Perubahan Sosial*. <https://doi.org/10.30762/asketik.v7i2.1163>
- Indriani, N. D. (2025). Perkembangan demokrasi: Studi komparasi pertarungan partai politik Islam pada Pemilu 2024. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 5(2), 159–178. <https://doi.org/10.30742/juispol.v5i2.4772>
- M, M. (2025). Prospek politik Islam dalam lanskap demokrasi Indonesia kontemporer. *Syura: Journal of Law*, 3(1), 39–58. <https://doi.org/10.58223/syura.v3i1.437>
- Menchik, J. (2016). *Islam and democracy in Indonesia: Tolerance without liberalism*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781316344446>
- Mietzner, M. (2020). Authoritarian innovations in Indonesia: Electoral narrowing, identity politics and executive illiberalism. *Democratization*, 27(6), 1021–1036. <https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1704266>
- Muhaimin, R., Fadlillah, S., & Asri, R. (2024). Dinamika pelemagaan partai Islam di Pemilu 2024: Studi kasus PKB, PKS, dan PPP. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 9(2), 121–141. <https://doi.org/10.35706/jpi.v9i2.13163>
- Pepinsky, T. B., Liddle, R. W., & Mujani, S. (2018). *Piety and public opinion: Understanding Indonesian Islam*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780190697808.001.0001>
- Prayitno, A. (2025). Islam as a political force: Reading the direction of Islamic political movement in Indonesia towards democracy. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 26(1), 28–43. <https://doi.org/10.36769/asy.v26i1.872>

- Refra, M. S., Kelibay, I., Widodo, S. E., Boinauw, I., & Rahakbauw, R. (2025). Dinamika politik Islam dalam sistem demokrasi Indonesia. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(2), 374–384. <https://doi.org/10.33506/jn.v11i2.4946>
- Suhaimi. (2023). Politik Islam Indonesia dan demokrasi Pancasila di era reformasi. *Refleksi: Jurnal Kajian Agama dan Filsafat*, 8(3). <https://doi.org/10.15408/ref.v8i3.37752>
- Syawal, R., & Fadlan, A. (2025). Demokrasi Islam di Indonesia: Tantangan dan peluang di era disrupsi digital. *Moderate El Siyasi: Jurnal Pemikiran Politik Islam*.
- Widia, A. P., Kurniawan, H., Bustomi, Y. I., & Osmara, N. (2025). The relationship between religion and state: The role of Islamic politics in the development of democracy in Indonesia. *El-Suffah: Jurnal Studi Islam*, 2(1), 62–82. <https://doi.org/10.70742/suffah.v2i1.159>